

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, penyelenggaraan pemerintahan baik melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi kepada kabupaten/kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan hal yang baik. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Setiap Daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah untuk membangun dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi dan keanekaragaman daerah dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah adalah sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi, social dan budaya ini, berdampak pada percepatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, demokrasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Oleh karena itulah sebagai konsekuennya dikeluarkan ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republic Indonesia” merupakan landasan hukum bagi keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004.

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini di titik beratkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan

masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna bagi membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akan tetapi masih banyak pihak yang belum memahami atau bisa membaca laporan keuangan dengan baik. Hal tersebut wajar karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami akuntansi. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk pembuatan keputusan, oleh karena itu dibutuhkanlah analisis laporan keuangan untuk membantu mereka. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan masyarakat dapat melihat kinerja keuangan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Menurut Muhammad Mahsun (2012:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja Menurut Robertson dalam Muhammad Mahsun (2014:25), pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan seberapa jauh pelanggan terpuaskan); dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja

yang digunakan adalah pengukuran kinerja *value for money* dimana pengukurannya dilihat dari rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

Indonesia pernah mengalami krisis perekonomian yang memprihatinkan, yang pada akhirnya melakukan perbaikan –perbaikan untuk mencapai taraf hidup dan kecerdasan rakyat sehingga beberapa sektor pembangunan yang menjadi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami pertumbuhan. (Subandi, 2012, p. 139).

Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM) salah satu tolak ukur untuk melihat kinerja keuangan Kabupaten/Kota, dimana dalam Indeks Pembangunan Manusia terdapat beberapa dimensi yang menentukan kinerja keuangan tersebut, diantaranya adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum menjadi tugas pokok pemerintah daerah. Kesejahteraan masyarakat tercapai ketika pemerintah daerah telah memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat. Dalam memberikan layanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan dana yang memang ditujukan untuk hal tersebut. Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait pembangunan, tetapi juga memberikan wewenang terkait dengan keuangan pemerintah daerah pengalokasian pendapatan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah juga menjadi

pertanggungjawaban pemerintah daerah, termasuk dana yang akan digunakan dalam aktivitas pendanaan layanan publik bagi masyarakat.

UNDP dalam *Human Development Index (HDI)*, me-ranking semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (tingkatan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu: pertama, usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan .

Dalam katalog BPS tentang Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan bahwa IPM digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang baik. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik dengan layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi antara lain, anggaran pendapatan daerah dengan realisasi pendapatan daerah (rasio efektivitas) kabupaten sukabumi mengalami fluktuatif dari tahun 2012-2016. Selain anggaran dan realisasi pendapatan yang mengalami fluktuatif, realisasi belanja dengan anggaran belanja (rasio ekomomi) pun mengalami fluktuatif dari tahun 2012-2016, sama halnya dengan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan (rasio efisiensi) Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mengalami fluktuatif.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi pendapatan Pemerintah Kab Sukabumi TA
2012-2016

Tahun	Anggaran pendapatan	Realisasi pendapatan	Presentase
2012	1.985.664.959.000	2.033.421.618.055	102,41%
2013	2.397.242.904.000	2.408.355.096.102	100,46%
2014	2.972.850.158.680	2.942.653.333.979	98,98%
2015	3.296.705.381.000	3.212.187.230.041	97,44%
2016	3.275.138.990.000	3.404.491.216.859	103,95%

(sumber : data hasil olahan peneliti)

Dapat dilihat perbedaan presentase anggaran dengan realisasi pendapatan dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2012 sampai tahun 2015 pemerintah kabupaten sukabumi mengalami penurunan, artinya capaian kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukabumi dalam hal ini tidak maksimal karna tidaknya tercapai anggaran yang telah ditetapkannya. Sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 pemerintah kabupaten sukabumi mengalami kenaikan, artinya kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukabumi menjadi lebih baik karena tercapainya anggaran pendapatan yang telah ditetapkan olehnya.

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi belanja Pemerintah Kab sukabumi TA 2012-
2016

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Presentase
2012	2.091.011.277.000	1.984.308.323.949	94,90%
2013	2.528.387.055.000	2.419.989.128.345	95,71%
2014	3.042.965.107.572	2.743.154.794.287	90,15%

2015	3.243.314.235.700	2.884.849.234.377	88,95%
2016	3.092.662.741.587	2.935.832.041.417	94,92%

(Sumber : data hasil olahan peneliti)

Dapat dilihat perbedaan presentase anggaran belanja dengan realisasi belanja dari tahun ke tahunnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuatif, artinya capaian kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukabumi dalam hal ini tidak maksimal karna tidak tercapai anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 1.3
Realisasi belanja dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab sukabumi
TA 2012-2016

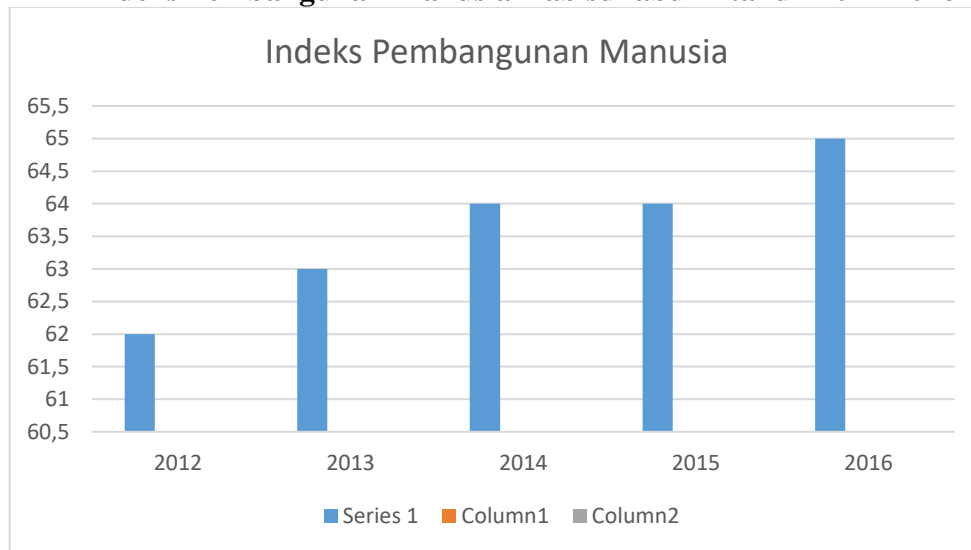
Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi pendapatan	Presentase
2012	1.984.308.323.949	2.033.421.618.055	97,58%
2013	2.419.989.128.345	2.408.355.096.102	100,48%
2014	2.743.154.794.287	2.942.653.333.979	93,22%
2015	2.884.849.234.377	3.212.187.230.041	88,56%
2016	2.935.832.041.417	3.404.491.216.859	86,23%

(Sumber : data hasil olahan peneliti)

Dapat dilihat presentase realisasi belanja dengan realisasi pendapatan dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2013 sampai tahun 2015 pemerintah kabupaten sukabumi mengalami penurunan, artinya capaian kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukabumi dalam hal ini tidak maksimal.

Sedangkan indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sukabumi setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun peningkatannya secara stagnan.

Gambar 1.1
Indeks Pembangunan Manusia Kab sukabumi tahun 2012-2016



Dalam menjamin terselenggaranya kinerja keuangan yang semakin baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD maupun penerimaan pendapatan yang lainnya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI”.

B. Identifikasi Masalah

Menganalisa kinerja keuangan daerah di Indonesia, mengungkapkan beberapa permasalahan di bidang keuangan daerah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah selama ini, khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang muncul ada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Capaian Pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang masih mengalami fluktuatif.
2. Capaian Belanja yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang masih mengalami fluktuatif.
3. Masih rendahnya Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dibandingkan dengan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat, namun kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi masih mengalami fluktuatif.

C. Rumusan Masalah

sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka penulis merumuskan masalah, yaitu :

1. Seberapa besar pengaruh Rasio Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2016.
2. Seberapa besar pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2016.
3. Seberapa besar pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2016.
4. Seberapa besar pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2016.

D. Tujuan Penelitian

sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2016.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia administrasi khususnya untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, adapun kegunaannya adalah :

- a) Untuk Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan di bidang ilmu administrasi, terutama sebagai pembelajaran dan memberikan informasi mengenai rasio keuangan pemerintah daerah dan kinerja keuangan.

- b) Untuk Lembaga

Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang administrasi yang ada kaitannya dengan masalah peningkatan kinerja keuangan.

- c) Untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka menciptakan kinerja keuangan yang baik yang sesuai dengan standar akuntansi public.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dari segi praktis, yaitu :

a) Untuk Penulis

Dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.

b) Untuk Lembaga

Sebagai bahan pustaka bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama, sehingga dapat mencari alternative pemecahan masalah yang sama.

c) Untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Memberikan informasi atau gambaran kepada aparatur dalam rangka peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukabumi adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Menurut Muhammad Mahsun (2012:25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Pengukuran kinerja Menurut

Robertson dalam Muhammad Mahsun (2014:25), pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan seberapa jauh pelanggan terpuaskan); dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja yang digunakan adalah pengukuran kinerja *value for money* dimana pengukurannya dilihat dari rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

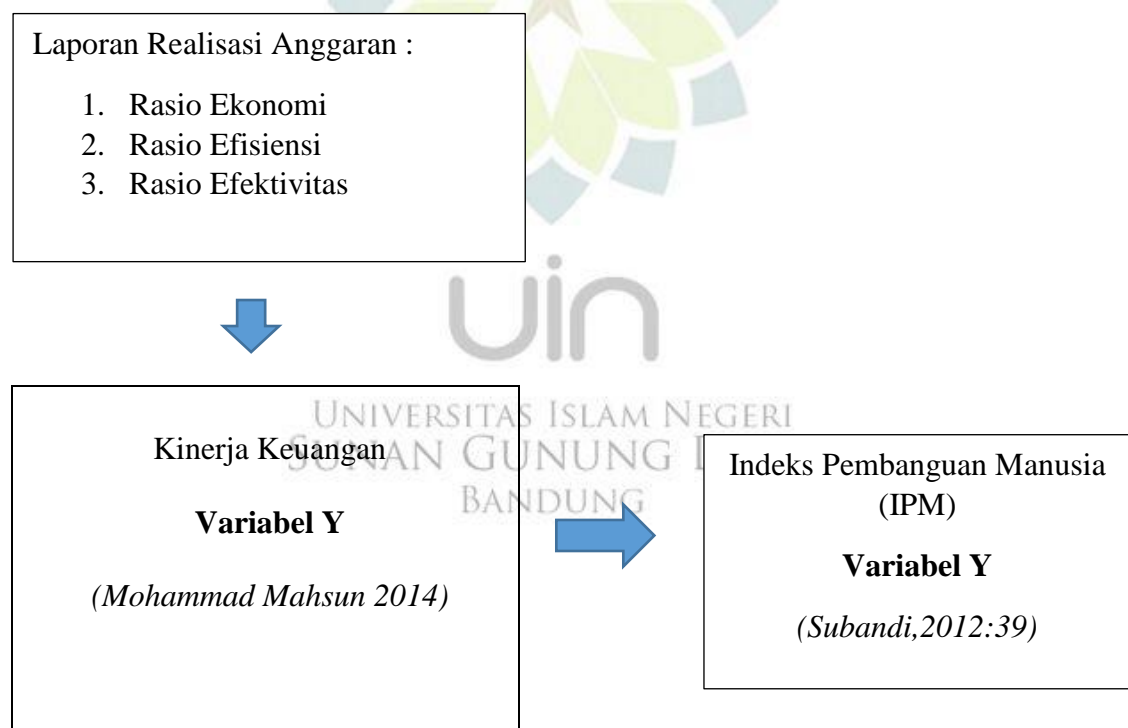
Di bawah ini ada tiga macam rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi terhadap indeks pembangunan manusia yaitu :

1. Rasio Ekonomi
2. Rasio Efisiensi
3. Rasio Efektivitas

Menurut UNDP dalam katalog Badan Pusat Statisti (2011:68), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator

angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Dengan menggunakan beberapa rasio diatas dapat diketahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukabumi terhadap indeks pembangunan manusia. jika semua rasio diatas menunjukkan hasil angka yang sesuai target maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan baik.



G. Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis menyusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ = Rasio Ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi pada Tahun anggaran 2012-2016.

H₂ = Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi pada Tahun anggaran 2012-2016.

H₃ = Rasio Efektivitas berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi pada Tahun anggaran 2012-2016.

H₄ = Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sukabumi pada Tahun anggaran 2012-2016.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG